

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Al-Marsudi, Subandi. 2016. *Pancasila dan UUD'45 dalam Paradigma Reformasi*. Jakarta: Rajawali Pers.

Mahrus Ali, Muhammad, dkk. 2014. *Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi yang Bersifat Konstitusional Bersyarat Serta Memuat Norma Baru*. Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Amin, Fakhry. 2025. *Peran Mahkamah Konstitusi dalam Menjaga Prinsip Konstitusionalisme di Indonesia: Studi Putusan Judicial Review Tahun 2019-2024*. Jurnal Ranah Research.

Anwar, Ahmad Hairil. 2019. *Peran Bawaslu dalam Penegakkan Hukum dan Keadilan Pemilu*. Voice Justisia.

Asahiddiqie, Jimly. 2006. *Model-Model Pengujian Konstitusi di Berbagai Negara*. Jakarta: Kompas.

Asshiddiqie, Jimly. 2005. *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan dalam UUD 1945*. Yogyakarta: FH UII Press.

Asshiddiqie, Jimly. 2006. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.

Asshiddiqie, Jimly. 2012. *Hukum Tata Negara*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.

Azhary, Muhammad Tahir. 2012. *Mahkamah Konstitusi dan Masa Depan Negara Hukum Demokrasi Indonesia*. Jakarta: Prenamedia Group.

Campbell, Tom. 2006. *Rights: A Critical Introduction*. Abingdon: Routledge.

Conte, Alex, et al. 2013. *Defining Civil and Political Rights: The Jurisprudence of the United Nations Human Rights Committee*. Farnham: Ashgate Publishing.

Dahl, Robert A. 1971. *Polyarchy Participation and Opposition*. New Haven and London: Yale University Press.

Danil, Elwi. 2021. *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana dan Pemberantasannya*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Daslani, Pitan (ed.). 2018. *Menyibak Kebenaran: Eksaminasi terhadap Putusan Perkara Irman Gusman*. Jakarta: Bumi Aksara.

Djuyandi, Yusa. 2017. *Pengantar Ilmu Politik*. Depok: Rajawali Pers.

Efendi, Sumardi, dkk. 2025. *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*. Tangerang: Akasa Printing.

- Fadjar, Abdul Mukhti. 2006. *Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Fadjar, Mukhtie. 2013. *Pemilu, Perselisihan Pemilu*. Malang: Setara Press.
- Fahmi, Khairul. 2021. *Pembatasan Hak Pilih Warga Negara*. Depok: RajaGrafindo Persada.
- Fajar, Mukti, dkk. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Freaddy, Firman. 2018. *Memahami Hukum Konstitusi Indonesia*. Depok: Rajawali Pers.
- Fromm, Erich. 2020. *Lari dari Kebebasan* (terj. Noa Dhegaska). Yogyakarta: Ircisod.
- Gusman, Irman. 2014. *Daerah Maju Indonesia Satu*. Jakarta: Anugrah Tri Lestari.
- Habibi, Andrian. 2020. *Menggugat Demokrasi Lokal*. Yogyakarta: Budi Utama.
- Huda, Ni'matul. 2013. *Pengujian Peraturan Perundang-Undangan di Bawah Satu Atap Mahkamah Konstitusi dalam Masa Depan Mahkamah Konstitusi RI Naskah Konferensi Mahkamah Konstitusi dan Pemajuan Hak Konstitusi Warga* (ed. Dri Utari Cristina Rachmawati, dkk.). Jakarta: Titik Koma.
- International IDEA. 2001. *Standar Internasional untuk Pemilihan Umum: Pedoman Peninjauan Kembali Kerangka Hukum Pemilu*. Stockholm: Publication Office.
- International Institute for Democracy and Electoral Assistance. 2010. *Electoral Justice: The International IDEA Handbook*. Stockholm: International IDEA.
- Kristanto, Tri Agung, dkk (ed.). 2024. *Suara Publik Bergaung di MK: Kepedulian dan Perhatian Masyarakat pada MK*. Jakarta: Kompas Media Nusantara.
- Lamintang, A.F., dkk. 2019. *Hukum Penitensier Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marshall, T.H. 1950. *Citizenship and Social Class*. New York: The Syndics of The Cambridge University Press.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2017. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Jakarta Timur: Prenada Media Group.
- Mas, Marwan. 2018. *Hukum Konstitusi dan Kelembagaan Negara*. Depok: RajaGrafindo Persada.
- Mas, Marwan. 2019. *Hukum Konstitusi dan Kelembagaan Negara*. Depok: Rajawali Pers.
- Matopo, Osgar S., dkk. 2018. *Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Malang: Intrans Publishing.

- MD, Moh. Mahfud. 2010. *Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Minan, Ahsanul, dkk. 2019. *Serial Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019 Perihal Pelaksanaan Hak Politik*. Jakarta: Bawaslu RI.
- Nurdin, Nurliah, dkk. 2022. *HAM, Gender dan Demokrasi (Sebuah Tinjauan Teoritis dan Praktis)*. Purbalingga: Sketsa Media.
- Pamungkas, Sigit. 2009. *Perihal Pemilu*. Yogyakarta: Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik, Universitas Gadjah Mada.
- Pureklolon, Thomas T. 2019. *Demokrasi dan Politik: Menelisik Dinamika Kekuasaan, Sosial, Budaya dan Pancasila*. Malang: Intrans Publishing.
- Rispalman, dkk. 2024. *Kewenangan DPD RI sebagai Lembaga Negara Legislatif*. Aceh: Bandar Publishing.
- Salman HS, dkk. 2017. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Santoso, Topo. 2019. *Pemilu di Indonesia: Kelembagaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Shafira, Maya, dkk. 2021. *Hukum Pemasyarakatan dan Penitensier*. Bandarlampung: Pusaka Media.
- Siahaan, Maruarar. 2005. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Situmorang, Januari. 2018. *Pemilu dalam Transisi Demokrasi Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish.
- Smith, Rhona K.M. 2008. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia.
- Soekanto, Soerjono, dkk. 2006. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Depok: RajaGrafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Sopacua, Margie Gladies, dkk. 2023. *Hukum Pemilihan Umum Indonesia*. Bandung: Widina Media Utama.
- Strong, C.F. 2018. *Konstitusi-Konstitusi Politik Modern: Studi Perbandingan tentang Sejarah dan Bentuk* (terj. Derta Sri Widowati). Bandung: Nusa Media.
- Sukardja, Ahmad. 2012. *Hukum Tata Negara & Hukum Administrasi Negara: Dalam Perspektif Fikih Siyasah*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Sutiyoso, Bambang. 2009. *Tata Cara Penyelesaian Sengketa di Lingkungan Mahkamah Konstitusi*. Yogyakarta: UII Press.

- Thohari, Ahsin. 2016. *Hak Konstitusional dalam Hukum Tata Negara*. Jakarta: Erlangga.
- Tim Penyusun Acara Mahkamah Konstitusi. 2010. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI.
- Ubaedillah. 2015. *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education) Pancasila, Demokrasi, dan Pencegahan Korupsi*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Waluyo, Bambang. 2022. *Penelitian Hukum dan Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Zaki, Muhammad Reza Syarifuddin. 2022. *Pengantar Ilmu Hukum dan Aspek Hukum dalam Ekonomi*. Jakarta: Kencana.

Jurnal Ilmiah

- Adidarma, Caka, dkk. 2022. "Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019 bagi Calon Kepala Daerah Berstatus Mantan Terpidana Korupsi Dipilih Kembali dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020". *Jurnal Res Publica*, Vol. 6, No. 2.
- Ane, Ade Putra, dkk. 2025. "Hak Politik Mantan Narapidana Sebagai Calon Legislatif Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia". *Jurnal Hukum*, Vol. 4, No.
- Aryani, Nyoman Mas, dkk. 2020. "Justifikasi Hak-Hak Politik Mantan Narapidana: Perspektif Hak Asasi Manusia dan Perundang-Undangan". *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol. 17, No. 2.
- Dewi, Ni Luh Putu Geney Sri Kusuma, dkk. 2021. "Karakteristik Putusan Mahkamah Konstitusi (Tinjauan Terhadap Putusan Konstitusional Bersyarat (Conditionally Constitutional) dan Putusan Inkonstitusional Bersyarat (Constitutionally Unconstitutional)". *Jurnal Yustitia*, Vol. 15, No. 2.
- Dorisara, Maximus. 2024. "Critical Review of the Journey of Democracy in Indonesia: Functions and Authorities of the Regional Representative Council (DPD) in the Constitutional System". *Journal of Social Science*, Vol. 5, No. 4. 27.
- Firdaus, Mohamad Aldy. 2015. "Implikasi Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Mantan Narapidana yang Menjadi Calon Kepala Daerah (Analisis Putusan MK Nomor 42/PUU-XIII/2015)". *Jurnal Hukum*, Vol. 2, No. 4.
- Indra, Mexsasai. 2011. "Dinamika Hukum Tata Negara". *Jurnal Hukum Lex Generalis* (Reprinted in Bandung: Refika Aditama).
- Jatmiko, Bayu Dwiwiddy. 2018. "Menelisik Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak Asasi Politik Pasca Perubahan UUD 1945". *Jurnal Panorama Hukum*, Vol. 3, No. 2.

- Laksono, Agung Budi, dkk. 2025. "Analisis Yuridis Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945". *Bhirawa Law Journal*, Vol. 6, No. 1.
- Lestari, Yayu Dwi, dkk. 2022. "Konstitusionalitas Pencalonan Calon Anggota Legislatif Mantan Narapidana (Kajian Implementasi Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 04/PUU-VII/2009)". *Journal of Lex Generalis*, Vol. 3, No. 8.
- Matura, dkk. 2020. "Hak Politik Mantan Narapidana Menjadi Calon Kepala Daerah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 56/PUU-XII/2019". *Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 1, No. 2.
- Muttaqin, Edy Faishal. 2012. "Politik Hukum Berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009 Tanggal 24 Maret 2009 Terhadap Hak-Hak Sosial dan Politik Mantan Narapidana (Analisis Yuridis Dalam Perspektif Hukum Tata Negara)". *Jurnal Konstitusi*, Vol. 4, No. 02.
- Nano, Paulus Julianta, dkk. 2026. "Analisis Teoritis Dolus dan Culpa Dalam Konsep Kesalahan sebagai Dasar Pertanggungjawaban Pidana". *Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum*, Vol. 4, No. 2.
- Rachman, Irfan Nur. 2013. "Politik Hukum Pengaturan Right to Vote and Right to be Candidate dalam Undang-Undang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi". *Jurnal Konstitusi*, Vol. 10, No. 2.
- Rusdiana, Shelvi, dkk. 2025. "Political Rights of Ex-Corruptors vis-a-vis Electoral Integrity in Indonesia". *Jurnal Hukum*, Vol. 14, No. 1.
- Rosa, Ellya, dkk. 2024. "Tinjauan Atas Legitimasi Mantan Narapidana Korupsi Sebagai Calon Anggota Legislatif". *Policies On Regulatory Reform Law Journal (PLJR)*, Vol. 1, No. 1.
- Sari, Adena Fitri Puspita. 2022. "Mahkamah Konstitusi Sebagai Negative Legislator dan Positive Legislator". *Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional*, Vol. 1, No. 1.
- Satyawasana, Ignatius Indra. 2019. "Analisa Akibat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XIV/2016 tentang Pencalonan Kepala Daerah Mantan Narapidana Terhadap Penyelenggaraan Pemilu yang Demokratis". *Jurnal Res Publica*, Vol. 3, No. 3.
- Setiowati, Sulis. 2024. "Analisis Mantan Narapidana Menjadi Calon Legislatif Berdasarkan Prinsip Musawa dan Keadilan". *Jurnal Kajian Moral dan Kewarganegaraan*, Vol. 4, No. 1.
- Shobrianto, Ahmad. 2023. "Proses Konsep Diri Mantan Narapidana (Studi Fenomenologi Anggota Komunitas Dedikasi Mantan Narapidana Untuk Negeri)". *Jurnal Kajian Moral dan Kewarganegaraan*, Vol. 11, No. 2.

- Sida, Noer. 2018. "Hak Mantan Narapidana untuk Turut Serta dalam Pemerintahan". *Jurnal Hukum*, Vol. 34, No. 2.
- Surbakti, Husnatul Faj'riyah, dkk. 2022. "Hak Politik Mantan Narapidana Dalam Perspektif Hak Politik Islam (Studi Putusan MK 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024)". *Jurnal Fikih Siyasah*, Vol. 7, No. 2.
- Suyitno, dkk. 2025. "Kajian Yuridis Terhadap Pemenuhan Hak Politik Mantan Narapidana dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU/VII/2009 dalam Perlindungan Konstitusi Hak Asasi Manusia". *Jurnal Konstitusi*, Vol. 2, No. 1.
- Syafi'ie, dkk. 2012. "Instrumen Hukum HAM, Pembentukan Lembaga Perlindungan HAM di Indonesia dan Peran Mahkamah Konstitusi". *Jurnal Konstitusi*, Vol. 9, Nomor 4.
- Tanjung, Muhammad Anwar, dkk. 2018. "Demokrasi dan Legalitas Mantan Narapidana dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Pemilihan Umum". *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 25, No. 2.

Skripsi, Tesis dan Disertasi

- Sabana, Fadli. 2024. *Keikutsertaan Mantan Narapidana Korupsi Sebagai Daftar Calon Tetap Pada Pemungutan Suara Ulang Dewan Perwakilan Daerah Sumatera Barat (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03-03/PHPU.DPD RI-XXII/2024)*. Skripsi. Padang: Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol.
- Nirgawati. 2024. *Rekonstruksi Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Berkenaan dengan Hak Politik Mantan Narapidana Tindak Pidana Korupsi dalam Pemilihan Umum Legislatif dan Eksekutif*. Disertasi. Yogyakarta: Program Doktor Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2003 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.

Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1563 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (International Covenant on Civil and Political Rights / ICCPR) yang diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005.

Putusan Pengadilan

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Nomor 14-7/PUU-V/2007

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Nomor 4/PUU-VII/2009

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Nomor 42/PUU-XIII/2015

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Nomor 71/PUU-XIV/2016

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Nomor 56/PUU-XVII/2019

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Nomor 87/PUU-XX/2022

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Nomor 12/PUU-XXI/2023

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Nomor 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan Nomor 97 PK/Pid.Sus/2019

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Putusan Nomor 600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Putusan Nomor 112/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Jkt.Pst

Website dan Media

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. 2025. *KBBI VI Daring: "Hak"*. Tersedia di: <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/hak>. Diakses pada 06 Desember 2025.

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. 2025. *KBBI VI Daring: "Mantan"*. Tersedia di: <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/mantan>. Diakses pada 06 Desember 2025.

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. 2025. *KBBI VI Daring: "Narapidana"*. Tersedia di: <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/narapidana>. Diakses pada 06 Desember 2025.

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. 2025. *KBBI VI Daring: "Politik"*. Tersedia di: <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/politik>. Diakses pada 06 Desember 2025.

Firmanto, Danang. 2016. "Begini Cerita Petugas KPK saat Menangkap Irman Gusman". *Tempo*. Tersedia di: <https://www.tempo.co/hukum/begini-cerita-petugas-kpk-saat-menangkap-irman-gusman-1309344>. Diakses pada 5 Maret 2016.

Humam, Muhammad Luthfi. 2024. "MK Kabulkan Gugatan Irman Gusman: Pileg DPD Sumbar Diulang". *Kumparan*. Diakses pada 24 April 2024.

Indonesia Corruption Watch. 2026. "Temuan ICW dalam Daftar Calon Tetap Anggota Legislatif: 56 Mantan Terpidana Korupsi Mencalonkan Diri pada Pemilu 2024 Mendatang". *Antikorupsi.org*. Tersedia di: <https://antikorupsi.org/id/temuan-icw-dalam-daftar-calon-tetap-calon-anggota-legislatif-56-mantan-terpidana-korupsi>. Diakses pada Selasa, 10 Maret 2026.

Muhid, Hendrik Khoirul. 2026. "Lolos ke DPD RI sebagai eks Terpidana, Begini Kilas Balik Kasus Korupsi Irman Gusman". *Tempo*. Tersedia di: <https://www.tempo.co/politik/lolos-ke-dpd-ri-sebagai-eks-terpidana-begini-kilas-balik-kasus-korupsi-irman-gusman-37577>. Diakses pada 4 Maret 2026.

Teresia, Ananda. 2024. "Tok! Pemilu Serentak Digelar 14 Februari 2024". *Kumparan*. Tersedia di: <https://kumparan.com/kumparannews/tok-pemilu-serentak-digelar-14-februari-20241xn1j7uwdvn/full>. Diakses pada 23 April 2025.

Wawancara

Alni. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat. Wawancara langsung. Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat, 16 April 2026.

Syakban, Ori Sativa. Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat. Wawancara langsung. Kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat, 17 April 2026.